



# **MODUL**

# **KEBIJAKAN PUBLIK**

## **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDENRENG RAPPANG





**MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**

**Nomor SK. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019**

Terakreditasi BAIK SEKALI SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No.608/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023

Jln. Ang. 45 No. 1A, Lt. Salo Rappang – Sidrap - Sulawesi Selatan, Telp. (0421) 93308

Website: [www.umsrappang.ac.id](http://www.umsrappang.ac.id) Email: [rektoratumsrappang@gmail.com](mailto:rektoratumsrappang@gmail.com)

---

# **MODUL LABORATORIUM KEBIJAKAN PUBLIK**

**Penguatan Pembelajaran, Riset Terapan, dan Pengabdian  
Berbasis Smart Village dan Digital Governance**

**Program Studi Magister Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang**

**2025**

## KATA PENGANTAR REKTOR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Modul Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Modul ini merupakan bagian integral dari upaya penguatan mutu akademik dan implementasi visi keilmuan Program Studi Magister Administrasi Publik yang berorientasi pada pengembangan kebijakan publik berbasis Smart Village, Digital Governance, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

Penyusunan modul ini menegaskan komitmen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam menghadirkan ekosistem pembelajaran magister yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada penguatan kompetensi aplikatif melalui pembelajaran berbasis praktik kebijakan, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata. Laboratorium Kebijakan Publik diposisikan sebagai wahana strategis untuk mengintegrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), profil lulusan, kurikulum, dan kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan desa mitra.

Modul ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada VMTS Program Studi, Peta Jalan Laboratorium, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang sah, terukur, dan berkelanjutan. Kehadiran modul ini juga menjadi bukti nyata pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam pengelolaan laboratorium akademik.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penyusun, pimpinan program studi, dosen, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga Modul Laboratorium Kebijakan Publik ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dosen dan mahasiswa sebagai instrumen pembelajaran, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi penguat keunggulan Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang di tingkat nasional.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan atas setiap ikhtiar kita dalam memajukan pendidikan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sidenreng Rappang, Januari 2025

Rektor,

**Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.**

NIDN. 0907057001

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **BUKU MODUL LABORATORIUM KEBIJAKAN PUBLIK**

## **PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**

Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik ini disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebijakan publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Modul ini telah diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Program Studi, Peta Jalan Laboratorium, serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Buku modul ini digunakan sebagai acuan resmi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Laboratorium Kebijakan Publik untuk mendukung pencapaian profil lulusan, peningkatan mutu akademik, dan penguatan keunggulan keilmuan berbasis Smart Village, Digital Governance, dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Disahkan di : Sidenreng Rappang

Pada tanggal : 1 Januari 2025

Rector Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang



**Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.**

NIDN 0907057001

## METADATA BUKU MODUL

| Komponen                | Keterangan                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Buku              | Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik                                                                                |
| Subjudul                | Penguatan Pembelajaran, Riset Terapan, dan Pengabdian Berbasis Smart Village dan Digital Governance                     |
| Program Studi           | Magister Administrasi Publik                                                                                            |
| Fakultas                | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik                                                                                   |
| Perguruan Tinggi        | Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang                                                                              |
| Bidang Keilmuan         | Administrasi Publik / Kebijakan Publik                                                                                  |
| Keunikan Keilmuan       | Kebijakan Publik berbasis Smart Village, Digital Governance, dan Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)                |
| Jenis Buku              | Buku Modul Laboratorium (Internal Program Studi)                                                                        |
| ISBN Internal           | MAP-LAB-KP-2025-001                                                                                                     |
| Tahun Berlaku           | 2025–2029                                                                                                               |
| Penanggung Jawab        | Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik                                                                        |
| Penyusun / Tim Penyusun | Tim Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang |
| Penelaah Akademik       | Dosen Tetap Program Studi Magister Administrasi Publik bidang Kebijakan Publik dan Administrasi Publik                  |
| Dasar Penyusunan        | VMTS Program Studi; Peta Jalan Laboratorium; Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) CPL1–CPL10; SN-DIKTI                    |
| Status Dokumen          | Dokumen resmi program studi untuk kegiatan akademik, akreditasi, dan penjaminan mutu internal                           |

## HALAMAN HAK CIPTA

Buku Modul Laboratorium Kebijakan PublikPenguatan Pembelajaran, Riset Terapan, dan Pengabdian Berbasis Smart Village dan Digital Governance

© 2025 Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Seluruh atau sebagian isi buku modul ini dilarang diperbanyak, disimpan dalam sistem pengambilan data, atau disebarluaskan dalam bentuk apa pun—baik elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun cara lainnya—tanpa izin tertulis dari Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, kecuali untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penjaminan mutu internal dengan mencantumkan sumber secara benar.

Buku modul ini disusun dan digunakan khusus sebagai dokumen akademik internal Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam rangka pelaksanaan pembelajaran berbasis laboratorium, penguatan penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebijakan publik.

ISBN Internal: MAP-LAB-KP-2025-001

Tahun Berlaku: 2025–2029

Penerbit Internal: Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Buku Modul Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang merupakan karya orisinal yang disusun oleh tim penyusun Program Studi dan bukan hasil plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya.

Penyusunan buku modul ini dilakukan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Program Studi, Peta Jalan Laboratorium, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), dengan mengacu pada berbagai sumber pustaka, regulasi, dan praktik terbaik yang relevan, yang seluruhnya telah dicantumkan dan digunakan secara etis dan akademis.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap kaidah keilmuan dan etika akademik dalam buku modul ini, maka kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan akademik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 1 Januari 2025

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang



**Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.**

NIDN 0907057001

## DAFTAR ISI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar Rektor .....                        | 1  |
| Lembar Pengesahan .....                            | 2  |
| Metadata Buku Modul .....                          | 3  |
| Halaman Hak Cipta.....                             | 4  |
| Pernyataan Orisinalitas.....                       | 5  |
| <i>Daftar Isi</i> .....                            | 6  |
| A. Identitas Modul .....                           | 7  |
| B. Landasan dan Urgensi Modul .....                | 8  |
| C. Tujuan Modul.....                               | 9  |
| D. Keterkaitan dengan CPL dan Profil Lulusan ..... | 10 |
| E. Ruang Lingkup dan Materi Modul .....            | 12 |
| F. Bentuk Kegiatan Laboratorium .....              | 13 |
| G. Integrasi dengan Mata Kuliah.....               | 14 |
| H. Luaran Modul .....                              | 17 |
| I. Penilaian dan Evaluasi .....                    | 18 |
| J. PPEPP Pengelolaan Laboratorium .....            | 20 |
| K. Penutup.....                                    | 21 |

## A. IDENTITAS MODUL

Modul ini disusun sebagai pedoman operasional penyelenggaraan Laboratorium Kebijakan Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Laboratorium Kebijakan Publik merupakan wahana akademik strategis yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam penguatan pembelajaran berbasis praktik kebijakan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis rekomendasi kebijakan publik.

Laboratorium ini memiliki keunikan keilmuan yang selaras dengan visi keilmuan program studi, yaitu pengembangan kebijakan publik berbasis Smart Village, Digital Governance, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Keunikan tersebut tercermin dalam fokus kajian, metode analisis, serta luaran laboratorium yang diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa dan daerah secara partisipatif, digital, berkelanjutan, dan berlandaskan etika publik Islami.

Dari sisi bentuk, Laboratorium Kebijakan Publik dikembangkan sebagai laboratorium hibrida yang mengintegrasikan laboratorium non-fisik berbasis kebijakan (policy-based laboratory) dengan dukungan perangkat analisis digital. Model ini memungkinkan pelaksanaan praktik kebijakan, simulasi perumusan kebijakan, analisis kebijakan berbasis data, serta penyusunan policy brief dan rekomendasi kebijakan tanpa ketergantungan pada infrastruktur fisik konvensional, sehingga efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Penyusunan modul ini didasarkan pada dokumen strategis dan regulatif yang relevan, meliputi VMTS Program Studi, Peta Jalan Laboratorium, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) CPL1–CPL10, dan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Dengan dasar tersebut, modul ini diharapkan menjadi instrumen kendali mutu dan pengembangan laboratorium yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.

## **B. LANDASAN DAN URGENSI MODUL**

Laboratorium Kebijakan Publik memiliki peran strategis sebagai wahana integratif dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dalam konteks pembelajaran, laboratorium ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik kebijakan yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan teori, konsep, dan model kebijakan publik ke dalam analisis kasus riil, simulasi perumusan kebijakan, serta evaluasi kebijakan sektor publik. Dalam bidang penelitian, laboratorium ini menjadi sarana pengembangan penelitian terapan kebijakan publik, khususnya yang berorientasi pada pemecahan masalah tata kelola pemerintahan desa dan daerah. Sementara itu, dalam pengabdian kepada masyarakat, laboratorium berperan sebagai pusat penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang mendukung peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat mitra.

Urgensi pengembangan modul ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya tantangan kebijakan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah, yang menuntut aparatur dan analis kebijakan memiliki kemampuan analisis kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lokal. Selain itu, berkembangnya paradigma Smart Village dan transformasi digital layanan publik menuntut kebijakan publik yang berbasis data, teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat, sehingga proses perumusan dan implementasi kebijakan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi berbasis inovasi dan kolaborasi multipemangku kepentingan.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Laboratorium Kebijakan Publik menjadi kebutuhan mendesak sebagai wahana analisis kebijakan berbasis data dan bukti, termasuk pemanfaatan hasil penelitian, data sektoral, dan informasi digital. Laboratorium ini juga berfungsi sebagai ruang akademik untuk simulasi perumusan dan evaluasi kebijakan, yang melatih mahasiswa dalam menyusun policy brief, rekomendasi kebijakan, dan model kebijakan publik yang solutif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **C. TUJUAN MODUL**

### **1. Tujuan Umum**

Modul Laboratorium Kebijakan Publik disusun sebagai panduan operasional yang sistematis dan terintegrasi untuk mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan Laboratorium Kebijakan Publik dalam mendukung pencapaian visi keilmuan Program Studi Magister Administrasi Publik. Secara umum, modul ini bertujuan menyediakan kerangka kerja pembelajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebijakan publik yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta profil lulusan, khususnya dalam pengembangan kebijakan publik berbasis Smart Village, Digital Governance, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, modul ini diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi analitis dan aplikatif dalam kebijakan publik, termasuk kemampuan menganalisis permasalahan kebijakan publik secara sistematis dan multidisipliner, menyusun policy brief dan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah, melakukan evaluasi kebijakan publik berbasis evidence-based policy, serta mengintegrasikan konsep Smart Village dan Digital Governance dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

1. Menganalisis masalah kebijakan publik secara sistematis dan multidisipliner.
2. Menyusun policy brief dan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti.
3. Melakukan evaluasi kebijakan publik berbasis evidence-based policy.
4. Mengintegrasikan Smart Village dan Digital Governance dalam kebijakan publik.

## D. KETERKAITAN DENGAN CPL DAN PROFIL LULUSAN

### 1. Keterkaitan CPL

Laboratorium Kebijakan Publik mendukung secara utama CPL2, CPL3, CPL4, CPL6, dan CPL10 Program Studi Magister Administrasi Publik, melalui penguatan kemampuan analisis kebijakan multidisipliner, perumusan dan evaluasi kebijakan, penyusunan rekomendasi berbasis evidence, kebijakan pembangunan desa berbasis Smart Village, serta advokasi dan komunikasi kebijakan publik.

5. CPL2: Analisis masalah kebijakan publik multidisipliner.
6. CPL3: Perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
7. CPL4: Evidence-based policy dan rekomendasi kebijakan.
8. CPL6: Kebijakan pembangunan desa berbasis Smart Village.
9. CPL10: Advokasi dan komunikasi kebijakan publik.

### 2. Keterkaitan Profil Lulusan

10. Analis Kebijakan Publik Tingkat Menengah.
11. Policy Entrepreneur.
12. Administrator/Manajer Sektor Publik.
13. Peneliti Administrasi Publik Terapan.

Laboratorium Kebijakan Publik dirancang sebagai wahana strategis yang secara langsung dan konsisten mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Melalui aktivitas analisis kebijakan multidisipliner, simulasi perumusan dan evaluasi kebijakan berbasis evidence-based policy, serta penyusunan policy brief dan advokasi kebijakan publik, laboratorium ini memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori, data, dan praktik kebijakan publik secara profesional. Keunikan laboratorium tercermin pada pengarusutamaan pendekatan Smart Village dan Digital Governance, yang mendukung perumusan kebijakan pembangunan desa dan pelayanan publik berbasis teknologi dan kearifan lokal.

### Matriks Keterkaitan Tujuan Modul – CPL – Profil Lulusan

Kode Tujuan Modul: TM1 = menganalisis permasalahan kebijakan publik secara sistematis dan multidisipliner; TM2 = menyusun policy brief dan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti; TM3 = melakukan evaluasi kebijakan publik berbasis evidence-based policy; TM4 = mengintegrasikan Smart Village dan Digital Governance dalam kebijakan publik.

Profil lulusan: PL1 = Administrator/Manajer Sektor Publik Tingkat Menengah; PL2 = Analis Kebijakan Publik Tingkat Menengah; PL3 = Policy Entrepreneur; PL4 = Peneliti Administrasi Publik Terapan.

| Tujuan Modul | CPL yang Didukung | Profil Lulusan Utama | Penjelasan Keterkaitan                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM1          | CPL1, CPL2, CPL3  | PL1, PL2             | Analisis masalah kebijakan memperkuat penguasaan teori, konsep, dan metode administrasi publik serta kemampuan analitis multidisipliner untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan. |

| Tujuan Modul | CPL yang Didukung | Profil Lulusan Utama | Penjelasan Keterkaitan                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM2          | CPL3, CPL4, CPL10 | PL2, PL3             | Penyusunan policy brief melatih kemampuan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, advokasi kebijakan, serta komunikasi kebijakan publik secara profesional dan kolaboratif.      |
| TM3          | CPL4, CPL5, CPL9  | PL2, PL4             | Evaluasi kebijakan berbasis evidence memperkuat kompetensi riset terapan, objektivitas akademik, serta orientasi keberlanjutan dalam kebijakan dan pembangunan daerah.                   |
| TM4          | CPL6, CPL7, CPL10 | PL1, PL3             | Integrasi Smart Village dan Digital Governance membentuk kemampuan inovasi kebijakan, transformasi layanan publik, serta kepemimpinan kolaboratif berbasis teknologi dan kearifan lokal. |

### Rekapitulasi Dukungan CPL

| CPL   | Didukung oleh Tujuan Modul                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| CPL1  | TM1                                                                 |
| CPL2  | TM1                                                                 |
| CPL3  | TM1, TM2                                                            |
| CPL4  | TM2, TM3                                                            |
| CPL5  | TM3                                                                 |
| CPL6  | TM4                                                                 |
| CPL7  | TM4                                                                 |
| CPL8  | Terintegrasi lintas TM melalui etika, AIK, dan integritas kebijakan |
| CPL9  | TM3                                                                 |
| CPL10 | TM2, TM4                                                            |

## E. RUANG LINGKUP DAN MATERI MODUL

Ruang lingkup dan materi Modul Laboratorium Kebijakan Publik dirancang secara komprehensif dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian CPL Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Materi dimulai dari pemahaman konseptual siklus kebijakan publik hingga praktik lanjutan berupa analisis kebijakan berbasis evidence, pemanfaatan big data, dan integrasi Smart Village serta Digital Governance dalam proses kebijakan. Penggunaan policy analysis tools, penyusunan policy brief, serta evaluasi dan advokasi kebijakan memperkuat kemampuan analitis, aplikatif, dan komunikatif mahasiswa.

### Matriks Pemetaan Materi Modul – CPL – Profil Lulusan

| No | Materi Modul                               | CPL Utama   | Profil Lulusan yang Didukung            |
|----|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 1  | Konsep dan Siklus Kebijakan Publik         | CPL3        | Administrator/Manajer, Analis Kebijakan |
| 2  | Identifikasi & Perumusan Masalah Kebijakan | CPL2        | Analis Kebijakan, Policy Entrepreneur   |
| 3  | Analisis Stakeholder & Kepentingan Publik  | CPL2, CPL10 | Policy Entrepreneur, Administrator      |
| 4  | Policy Analysis Tools (SWOT, RIA, CBA)     | CPL3, CPL4  | Analis Kebijakan, Peneliti Terapan      |
| 5  | Kebijakan Publik berbasis Smart Village    | CPL6        | Administrator, Policy Entrepreneur      |
| 6  | Digital Governance dalam Proses Kebijakan  | CPL7, CPL10 | Administrator, Analis Kebijakan         |
| 7  | Evidence-Based Policy & Big Data Kebijakan | CPL4, CPL5  | Peneliti Terapan, Analis Kebijakan      |
| 8  | Penyusunan Policy Brief & Policy Paper     | CPL4, CPL10 | Analis Kebijakan, Policy Entrepreneur   |
| 9  | Evaluasi & Monitoring Kebijakan Publik     | CPL3, CPL4  | Administrator, Peneliti Terapan         |
| 10 | Advokasi & Komunikasi Kebijakan            | CPL10       | Policy Entrepreneur, Administrator      |

## **F. BENTUK KEGIATAN LABORATORIUM**

### **1. Praktik Analisis Kasus Kebijakan Daerah**

Mahasiswa melakukan analisis mendalam terhadap kasus kebijakan aktual di tingkat daerah, meliputi identifikasi masalah, analisis aktor dan kepentingan, kerangka regulasi, serta dampak kebijakan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan problem-based learning dan case-based learning, dengan memanfaatkan data kebijakan, dokumen perencanaan daerah, dan hasil penelitian terapan laboratorium.

### **2. Simulasi Perumusan Kebijakan Publik**

Mahasiswa dilibatkan dalam simulasi proses perumusan kebijakan publik mulai dari agenda setting, formulasi alternatif kebijakan, konsultasi publik, hingga penetapan rekomendasi kebijakan. Simulasi dilakukan secara individual dan kelompok, dengan skenario kebijakan yang relevan dengan isu Smart Village, Digital Governance, dan pelayanan publik.

### **3. Klinik Policy Brief**

Laboratorium menyelenggarakan policy brief clinic sebagai wahana pendampingan intensif bagi mahasiswa dalam menyusun policy brief dan policy paper berbasis evidence-based policy. Kegiatan ini mencakup bimbingan struktur policy brief, teknik analisis kebijakan, penggunaan data dan visualisasi kebijakan, serta strategi penyampaian rekomendasi kepada pengambil keputusan.

### **4. Review dan Evaluasi Kebijakan Nyata**

Mahasiswa melakukan review dan evaluasi terhadap kebijakan nyata, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan program strategis pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan policy evaluation sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

### **5. Kolaborasi dengan Mitra Strategis**

Laboratorium Kebijakan Publik menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah, desa/kelurahan mitra Smart Village, OPD, dan lembaga kebijakan sebagai sumber data, kasus kebijakan, serta wahana implementasi hasil laboratorium.

Bentuk kegiatan Laboratorium Kebijakan Publik dirancang secara sistematis, aplikatif, dan kolaboratif untuk menjamin ketercapaian CPL dan profil lulusan Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Melalui praktik analisis kasus, simulasi perumusan kebijakan, klinik policy brief, serta evaluasi kebijakan nyata, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam proses kebijakan publik berbasis evidence, Smart Village, dan Digital Governance.

## G. INTEGRASI DENGAN MATA KULIAH

Laboratorium Kebijakan Publik berfungsi sebagai wahana praktik, simulasi, dan riset terapan yang terintegrasi langsung dengan mata kuliah inti Program Studi Magister Administrasi Publik. Integrasi ini memastikan ketercapaian CPL melalui pembelajaran berbasis kasus, data, dan kebijakan nyata.

### 1. Teori dan Praktik Kebijakan Publik (MAP604)

Laboratorium digunakan untuk praktik siklus kebijakan publik, analisis aktor, dan simulasi perumusan kebijakan, sehingga memperkuat pemahaman teoritis melalui studi kasus kebijakan daerah dan desa.

### 2. Analisis Kebijakan Publik Lanjutan (MAP605)

Mahasiswa memanfaatkan laboratorium untuk menerapkan policy analysis tools seperti SWOT, RIA, dan cost-benefit analysis serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis evidence dan data aktual.

### 3. Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik (MAP606)

Laboratorium menjadi ruang eksperimen inovasi kebijakan publik, termasuk desain kebijakan inovatif, kebijakan digital, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

### 4. Smart Village dan Tata Kelola Desa (MAP608)

Kegiatan laboratorium diarahkan pada analisis dan perumusan kebijakan pembangunan desa berbasis Smart Village, dengan studi lapangan dan kolaborasi desa mitra.

### 5. Digital Governance dan Pelayanan Publik (MAP609)

Laboratorium mendukung simulasi kebijakan digital, analisis layanan publik berbasis teknologi, serta pemanfaatan data dan aplikasi pelayanan publik dalam proses kebijakan.

### 6. Metode Penelitian Administrasi Publik (MAP607)

Laboratorium menjadi sarana penelitian terapan kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data kebijakan, hingga penyusunan policy brief dan artikel ilmiah.

**Tabel Integrasi Mata Kuliah – Laboratorium – CPL**

| No | Mata Kuliah                               | Bentuk Integrasi di Laboratorium Kebijakan Publik | CPL Utama   |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Teori dan Praktik Kebijakan Publik        | Analisis kasus dan simulasi siklus kebijakan      | CPL2, CPL3  |
| 2  | Analisis Kebijakan Publik Lanjutan        | Policy analysis tools & rekomendasi kebijakan     | CPL2, CPL4  |
| 3  | Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik | Desain inovasi dan kebijakan kolaboratif          | CPL3, CPL10 |
| 4  | Smart Village dan Tata Kelola             | Perumusan kebijakan desa berbasis Smart Village   | CPL6        |

| No | Mata Kuliah                             | Bentuk Integrasi di Laboratorium Kebijakan Publik | CPL Utama   |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|    | Desa                                    |                                                   |             |
| 5  | Digital Governance dan Pelayanan Publik | Analisis kebijakan digital & layanan publik       | CPL7, CPL10 |
| 6  | Metode Penelitian Administrasi Publik   | Riset terapan kebijakan & policy brief            | CPL4, CPL5  |

*Keterangan: CPL merujuk pada CPL1–CPL10 Prodi Magister Administrasi Publik.*

Integrasi Laboratorium Kebijakan Publik dengan mata kuliah inti Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui pembelajaran berbasis praktik, simulasi kebijakan, dan riset terapan. Setiap mata kuliah memanfaatkan laboratorium sebagai ruang aplikasi teori, pengembangan analisis kebijakan berbasis data, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dengan isu Smart Village dan Digital Governance.

### **Matriks Kegiatan Laboratorium – Mata Kuliah – Luaran – Bukti Fisik**

| No | Kegiatan Laboratorium                                                     | Mata Kuliah Terkait                                | Luaran Utama                      | Bukti Fisik (Verifiable Evidence)                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis kasus kebijakan publik daerah/desa                               | Teori dan Praktik Kebijakan Publik (MAP604)        | Laporan analisis kasus kebijakan  | RPS berbasis praktik, laporan mahasiswa, berita acara kegiatan, dokumentasi foto |
| 2  | Simulasi siklus kebijakan publik (agenda–formulasi–implementasi–evaluasi) | Teori dan Praktik Kebijakan Publik (MAP604)        | Dokumen simulasi kebijakan        | Modul praktikum, rubrik penilaian, video/screenshot simulasi                     |
| 3  | Penerapan policy analysis tools (SWOT, RIA, CBA)                          | Analisis Kebijakan Publik Lanjutan (MAP605)        | Policy paper / policy brief       | Contoh policy brief mahasiswa, rubrik penilaian, repository tugas                |
| 4  | Klinik penyusunan policy brief berbasis evidence                          | Analisis Kebijakan Publik Lanjutan (MAP605)        | Policy brief siap advokasi        | Policy brief, surat pengantar ke mitra, dokumentasi klinik                       |
| 5  | Desain inovasi kebijakan publik dan kebijakan digital                     | Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik (MAP606) | Proposal inovasi kebijakan        | Proposal inovasi, logbook kegiatan, dokumentasi diskusi                          |
| 6  | Analisis kebijakan Smart Village dan tata kelola desa                     | Smart Village dan Tata Kelola Desa (MAP608)        | Rekomendasi kebijakan desa        | Laporan lapangan, MoU/IA desa mitra, dokumentasi kegiatan                        |
| 7  | Simulasi kebijakan digital dan pelayanan publik                           | Digital Governance dan Pelayanan Publik (MAP609)   | Model kebijakan digital           | Dokumen simulasi, screenshot aplikasi/layanan, rubrik penilaian                  |
| 8  | Review dan evaluasi Perda/Perkada/Program Daerah                          | Metode Penelitian Administrasi Publik (MAP607)     | Laporan evaluasi kebijakan        | Laporan evaluasi, instrumen penelitian, berita acara                             |
| 9  | Riset terapan kebijakan publik berbasis laboratorium                      | Metode Penelitian Administrasi Publik (MAP607)     | Draft artikel ilmiah              | Draft artikel, bukti submit jurnal/prosiding, logbook riset                      |
| 10 | Diseminasi hasil analisis kebijakan (seminar mini/FGD)                    | Terintegrasi beberapa mata kuliah                  | Notulensi & rekomendasi kebijakan | Undangan, daftar hadir, notulensi, dokumentasi kegiatan                          |

## H. LUARAN MODUL

Luaran Modul Laboratorium Kebijakan Publik dirancang terukur, aplikatif, dan berdampak, serta mendukung pencapaian CPL dan profil lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang berkeunggulan Smart Village dan Digital Governance. Luaran utama meliputi:

14. **Policy Brief Mahasiswa:** dokumen analisis kebijakan berbasis data dan evidence yang disusun mahasiswa melalui praktik laboratorium, digunakan sebagai instrumen pembelajaran, evaluasi CPL, dan bahan advokasi kebijakan publik.
15. **Model Kebijakan Publik Berbasis Smart Village:** model konseptual dan operasional kebijakan pembangunan desa yang mengintegrasikan tata kelola partisipatif, teknologi digital, dan kearifan lokal sebagai ciri keunggulan keilmuan program studi.
16. **Rekomendasi Kebijakan untuk Mitra:** rekomendasi kebijakan tertulis yang dihasilkan melalui kerja kolaboratif dengan pemerintah daerah, desa/kelurahan mitra, dan OPD, sebagai bentuk kontribusi tridarma dan penguatan jejaring kelembagaan.
17. **Publikasi Ilmiah Terapan:** artikel ilmiah berbasis hasil kegiatan laboratorium yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau prosiding, mendukung budaya riset terapan dan peningkatan rekognisi akademik prodi.
18. **Dokumen Advokasi Kebijakan:** dokumen pendukung proses advokasi kebijakan seperti policy paper, bahan FGD, dan executive summary yang digunakan dalam forum konsultasi publik, diskusi kebijakan, dan diseminasi hasil analisis.

Luaran modul ini menunjukkan bahwa Laboratorium Kebijakan Publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai pusat produksi pengetahuan terapan, rekomendasi kebijakan, dan advokasi publik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan desa berbasis Smart Village. Keberadaan luaran yang terdokumentasi dan berkelanjutan memperkuat keterpaduan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## I. PENILAIAN DAN EVALUASI

Penilaian kegiatan Laboratorium Kebijakan Publik dilakukan secara otentik dan berorientasi luaran. Evaluasi tidak hanya menilai proses partisipasi mahasiswa, tetapi juga kualitas produk akademik dan relevansi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penilaian dilaksanakan oleh dosen pengampu dan kepala laboratorium dengan memperhatikan ketercapaian CPL, kualitas analisis, validitas data, kemampuan komunikasi kebijakan, serta etika akademik.

### Komponen Penilaian

19. Partisipasi dan keterlibatan aktif dalam kegiatan laboratorium.
20. Kualitas analisis masalah dan kerangka kebijakan yang digunakan.
21. Kualitas luaran seperti policy brief, laporan analisis, policy paper, atau dokumen rekomendasi.
22. Kemampuan presentasi, advokasi, dan komunikasi kebijakan publik.
23. Kedisiplinan dokumentasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap etika akademik.

### Bukti Evaluasi

- RPS berbasis laboratorium dan rubrik penilaian;
- laporan kegiatan laboratorium;
- policy brief, policy paper, atau laporan evaluasi kebijakan;
- dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dan berita acara;
- umpan balik mahasiswa dan mitra kebijakan.

### Matriks Kegiatan Laboratorium – Luaran – Bukti Fisik

| No | Kegiatan Laboratorium Kebijakan Publik                     | Mata Kuliah Terkait                                                           | Luaran Utama                                 | Bukti Fisik (Evidence)                                                               |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Praktik Analisis Kasus Kebijakan Daerah                    | Teori dan Praktik Kebijakan Publik; Analisis Kebijakan Publik Lanjutan        | Laporan analisis kebijakan daerah            | RPS berbasis laboratorium, laporan mahasiswa, rubrik penilaian, dokumentasi kegiatan |
| 2  | Simulasi Perumusan Kebijakan Publik                        | Teori dan Praktik Kebijakan Publik; Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik | Draft kebijakan / policy option              | Modul praktikum, hasil simulasi, berita acara, foto kegiatan                         |
| 3  | Klinik Penyusunan Policy Brief                             | Analisis Kebijakan Publik Lanjutan; Penulisan Artikel Ilmiah                  | Policy brief mahasiswa                       | Policy brief terarsip, rubrik asesmen, daftar hadir                                  |
| 4  | Analisis Kebijakan Berbasis Smart Village                  | Smart Village dan Tata Kelola Desa                                            | Model kebijakan pembangunan desa             | Dokumen model kebijakan, laporan praktikum, MoU/IA mitra desa                        |
| 5  | Digital Governance dalam Proses Kebijakan                  | Digital Governance dan Pelayanan Publik                                       | Rekomendasi kebijakan digital layanan publik | Laporan analisis, output digital, dokumentasi sistem/aplikasi                        |
| 6  | Review dan Evaluasi Kebijakan Nyata (Perda/Program Daerah) | Analisis Kebijakan Publik Lanjutan; Metode Penelitian Administrasi Publik     | Laporan evaluasi kebijakan                   | Dokumen evaluasi, instrumen analisis, bukti validasi dosen                           |
| 7  | Praktik Evidence-Based Policy & Big Data                   | Metode Penelitian Administrasi Publik; Digital Governance                     | Policy paper berbasis data                   | Dataset, laporan analisis, tangkapan layar tools analitik                            |

| No | Kegiatan Laboratorium Kebijakan Publik               | Mata Kuliah Terkait                                  | Luaran Utama                      | Bukti Fisik (Evidence)                                    |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8  | Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Publik             | Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik            | Dokumen advokasi kebijakan        | Materi presentasi, video/rekaman advokasi, surat undangan |
| 9  | Kolaborasi Laboratorium dengan Pemerintah/Desa Mitra | Smart Village dan Tata Kelola Desa; Kebijakan Publik | Rekomendasi kebijakan untuk mitra | MoU/IA, laporan PkM berbasis kebijakan, testimoni mitra   |
| 10 | Integrasi Hasil Laboratorium ke Publikasi Ilmiah     | Penulisan Artikel Ilmiah; Tesis                      | Artikel ilmiah terapan            | Draft artikel, bukti submit/publish, repositori institusi |

## **J. PPEPP PENGELOLAAN LABORATORIUM**

### **1. Penetapan**

Program studi menetapkan kebijakan, modul laboratorium, SOP, dan kemitraan strategis yang selaras dengan VMTS Prodi, CPL, serta kebutuhan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **2. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis praktik kebijakan, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk analisis kasus, simulasi perumusan kebijakan, penyusunan policy brief, dan evaluasi kebijakan nyata yang terintegrasi dengan mata kuliah inti.

### **3. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pengukuran ketercapaian CPL, kualitas luaran tridarma, serta umpan balik mahasiswa dan mitra. Evaluasi mencakup aspek relevansi kegiatan, mutu luaran, dan kebermanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

### **4. Pengendalian**

Hasil evaluasi menjadi dasar pengendalian melalui rapat evaluasi, perbaikan modul, penyesuaian metode, serta penguatan relevansi kegiatan laboratorium terhadap isu strategis kebijakan publik.

### **5. Peningkatan**

Tahap peningkatan diarahkan pada penguatan mutu modul laboratorium, inovasi praktik berbasis Smart Village dan Digital Governance, serta perluasan jejaring kolaborasi dengan pemerintah daerah, desa mitra, OPD, dan lembaga kebijakan.

Pengelolaan Laboratorium Kebijakan Publik Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP. Dengan demikian, laboratorium berfungsi optimal sebagai instrumen kendali mutu akademik dan penguat keunggulan Program Studi.

## K. PENUTUP

Modul Laboratorium Kebijakan Publik disusun sebagai instrumen strategis untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Modul ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pembelajaran magister yang aplikatif, kontekstual, dan berbasis praktik kebijakan publik, sekaligus mendukung pengembangan keilmuan administrasi publik yang adaptif terhadap dinamika desentralisasi, Smart Village, dan Digital Governance.

Seluruh substansi modul telah diselaraskan secara sistematis dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi, Peta Jalan Laboratorium, serta Capaian Pembelajaran Lulusan dan profil lulusan. Melalui integrasi kegiatan laboratorium dengan mata kuliah inti, modul ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada penguatan kemampuan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi berbasis bukti, evaluasi kebijakan, serta advokasi dan komunikasi kebijakan publik.

Pelaksanaan Modul Laboratorium Kebijakan Publik didukung oleh mekanisme penjaminan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP. Mekanisme ini menjamin ketercapaian CPL, relevansi luaran dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta keberlanjutan pengembangan kualitas modul dan jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, desa mitra Smart Village, dan lembaga kebijakan. Dengan demikian, modul ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional laboratorium, tetapi juga sebagai bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal pada tingkat program studi.

Dengan tersusunnya Modul Laboratorium Kebijakan Publik ini, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ekosistem pembelajaran yang unggul, berdampak, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Modul ini sekaligus memperkuat posisi program studi sebagai pusat pengembangan kebijakan publik berbasis Smart Village, Digital Governance, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkelanjutan.